

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kangkung)

Ifana Dzikriyah¹, Maryono²

^{1,2}Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received : June 8, 2025

Revised : June 18, 2025

Accepted : June 25, 2025

Published : July 01, 2025

Keywords:

Accountability of village, fund management, Siskeudes application, Transparency, Competence, Internal control system

ABSTRACT

This study investigates the factors influencing accountability in the management of village funds by local governments in Kangkung District, Kendal Regency. The research is driven by the growing number of village fund mismanagement cases in Indonesia, highlighting the urgent need for improved governance. Key variables examined in this study include the use of the siskeudes application, staff competence, transparency, internal control systems, local wisdom, and organizational commitment. A quantitative approach was employed, with data gathered through questionnaires distributed to 63 respondents comprising village officials, BPD members, and community representatives. The results are expected to provide both theoretical contributions to the field of public sector accounting and practical insights for village governments to enhance financial accountability and transparency. Ultimately, the study aims to support the development of sustainable and participatory village governance.

Keywords: *Accountability of village funds management, siskeudes application, transparency, staff competence, internal control system, local wisdom, organizational commitment.*

Corresponding Author:

Ifana Dzikriyah

Akuntansi, Fakultas Ekonomika & Bisnis, Universitas Stikubank Semarang

Jl. Kendeng V Bendan Ngisor, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. 50233

Email: ifanadzikriyah@mhs.unisbank.ac.id



1. PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan paling dasar yang memiliki karakteristik khas serta lekat dengan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diakui sebagai komunitas hukum yang memiliki batas wilayah jelas dan diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan pembangunan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi lokal yang berpijak pada hak asal usul dan tradisi yang dihormati dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemandirian desa ini tercermin dari kemampuan desa dalam mengelola keuangan, termasuk dana desa, secara efektif dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, dana desa merupakan alokasi anggaran dari APBN yang disalurkan melalui APBD kabupaten atau kota untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana ini merupakan strategi pemerintah pusat dalam memperkuat otonomi serta kemandirian desa. Dengan pendanaan yang memadai setiap tahunnya, desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengimplementasikan program pembangunan sesuai kebutuhan lokal, serta memperluas partisipasi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan desa yang mandiri, kompetitif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Safitri & Jaeni, 2024).

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merujuk pada kewajiban pihak pengelola untuk mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa secara transparan dan sistematis untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup rangkaian proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang akuntabel dan terbuka. Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten akan mendorong keteraturan dalam pelaporan serta mencegah terjadinya penyimpangan. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mendukung proses ini, serta memperkuat pengawasan terhadap kinerja aparat desa dalam mengelola dana secara bertanggung jawab (Amaliya & Maryono, 2022). *Indonesian Corruption Watch (ICW)* mencatat bahwa korupsi di tingkat desa terus meningkat dari 2015 hingga 2021, dengan 592 kasus dan kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar, seiring besarnya alokasi dana desa sebesar Rp 400,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan sosial. Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga kesejahteraan masyarakat desa sehingga memerlukan perhatian dan tindakan pencegahan yang lebih efektif. Salah satu kasus mencuat di Kabupaten Kendal, di mana Kepala Desa terbukti melakukan penggelapan dana desa selama dua tahun dengan kerugian sekitar Rp 245 juta, sehingga dijatuhi hukuman penjara dan wajib mengganti kerugian tersebut.

Pemerintah desa mengalami berbagai tantangan dalam pengelolaan dana desa, khususnya dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan yang memengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan kapasitas, pemahaman, serta komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip manajemen keuangan publik, disertai penerapan regulasi yang lebih ketat dan pelatihan intensif bagi aparat desa (Safitri & Jaeni, 2024). Dalam ranah akuntansi sektor publik, pemerintah desa berperan sebagai *steward* yang wajib memastikan dana dikelola dengan transparan dan akuntabel. Sementara masyarakat sebagai *principals* berhak memperoleh informasi terkait penggunaan dana untuk mendorong partisipasi dan membangun kepercayaan. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat krusial untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan melalui penyampaian informasi yang seimbang (Nislandi & Munari, 2023).

Berbagai faktor memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, salah satunya adalah komitmen organisasi. Komitmen ini menunjukkan tingkat dedikasi dan tanggung jawab anggota terhadap visi dan tujuan organisasi serta kesediaan untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan bertanggung jawab (Rada et al., 2022). Individu dengan komitmen tinggi cenderung melaksanakan tugas dengan integritas, melaporkan penggunaan dana secara jujur, dan mematuhi prosedur yang berlaku, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penting bagi organisasi desa untuk menanamkan nilai komitmen melalui pelatihan, pengembangan kapasitas, dan penghargaan agar dapat mendukung akuntabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Optimalisasi pengelolaan dana desa juga didukung oleh penerapan sistem komputerisasi, seperti aplikasi siskeudes yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Sistem ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan dana desa secara akurat dan efisien (Safitri & Jaeni, 2024). Penggunaan siskeudes memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mengurangi risiko penyimpangan dan korupsi (Tiarno & Budiwitjaksono, 2023).

Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori *stewardship* menekankan bahwa manajer tidak hanya mengejar kepentingan pribadi, tetapi lebih mengutamakan keberhasilan organisasi secara keseluruhan (Saputra et al., 2024). Dalam konsep desa, aparat pemerintah berperan sebagai pengelola dana yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Disisi lain masyarakat memiliki hak untuk menerima laporan pertanggungjawaban, menjadikan mereka sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas kinerja pemerintah desa. Teori ini juga menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam struktur organisasi, di mana komitmen aparat desa terhadap pelayanan publik menjadi kunci terciptanya pengelolaan dana desa yang efisien, inovatif, dan berorientasi jangka panjang.

Safitri & Jaeni (2024) menjelaskan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berkaitan erat dengan sejauh mana tujuan organisasi, dalam hal ini pemerintahan desa, tercapai. Kinerja yang optimal dari aparat desa dapat menciptakan rasa puas di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan publik. Oleh karena itu, kesuksesan dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa tidak hanya diukur dari pencapaian administratif, melainkan juga dari seberapa jauh kebutuhan dan harapan masyarakat dapat dipenuhi secara nyata. Lebih jauh, teori ini menegaskan pentingnya kompetensi pemerintah desa dalam mengelola dana secara akuntabel dan transparan untuk menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat dan meningkatkan kredibilitas pemerintah desa. Implementasi pengendalian yang baik diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang informatif dan dapat dipercaya oleh publik. Selain itu, keberhasilan pengelolaan tersebut bergantung pada komitmen organisasi yang menempatkan tujuan kolektif di atas kepentingan individu, sehingga arah pembangunan desa dapat tercapai sesuai rencana dan berkelanjutan.

Penggunaan aplikasi siskeudes memiliki peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan yang sesuai aturan, efisien, dan transparan (Arfiansyah et al., 2020). Aplikasi ini memudahkan pemerintah desa dalam teori *stewardship* bertindak sebagai *steward* dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Sementara itu masyarakat sebagai pemilik kepentingan atau *principals* (Natania Mega et al., 2022). Pernyataan tersebut sependapat oleh penelitian Natania Mega et al (2022),

Arfiansyah et al (2020), Tiarno & Budiwitjaksono (2023). Berdasarkan landasan teori dan temuan, maka dirumuskan hipotesis:

H1: Aplikasi siskeudes berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia, khususnya aparatur desa yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan tugasnya. Pengembangan kapasitas melalui pelatihan menjadi aspek penting agar mereka mampu mengelola keuangan desa secara efektif dan bertanggung jawab (Safitri & Jaeni, 2024). Hal ini berkaitan erat dengan teori *stewardship* di mana perangkat desa bertindak sebagai pengelola (*steward*) yang bertugas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai pemilik kepentingan (*principal*). Oleh karena itu, kompetensi aparatur memiliki peran penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Pendapat tersebut didukung dari temuan yang dihasilkan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Aprilia & Fitria (2023), Amaliya & Maryono (2022) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif. Maka dirumuskan hipotesis:

H2: Kompetensi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Keterbukaan informasi menjadi elemen penting dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara efektif. Semakin transparan pemerintah desa dalam menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil kegiatan, semakin besar pula kontribusinya terhadap terciptanya akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat (Aprilia & Fitria, 2023). Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan saran dan kritik yang membangun, sehingga kualitas pengelolaan dapat terus ditingkatkan (Safitri & Jaeni, 2024). Dalam kerangka teori *stewardship*, pemerintah desa sebagai pengelola sumber daya publik berkewajiban menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat sebagai pemilik kepentingan (*principal*). Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Situngkir & Simarmata (2022), Fajri & Julita (2021) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik melalui pengelolaan dana desa yang jujur dan terbuka untuk membangun kepercayaan publik (Amaliya & Maryono, 2022). Berdasarkan teori *stewardship*, aparat desa bertindak sebagai pihak yang dipercaya (*steward*) oleh masyarakat (*principals*) dan wajib menjalankan sistem pengendalian internal secara optimal karena hal tersebut berpengaruh terhadap transparansi dan kualitas pengambilan keputusan (Safitri & Jaeni, 2024). Sejalan dengan temuan sebelumnya dari Amaliya & Maryono (2022), serta Nislandi & Munari (2023) sistem pengendalian internal terbukti memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kearifan lokal merepresentasikan jati diri budaya yang memungkinkan suatu bangsa mengolah pengaruh luar menjadi keunikan tersendiri (Hestiani, 2023). Dalam pengelolaan dana desa, penerapan nilai-nilai lokal penting untuk memastikan keputusan dilakukan secara etis dan terbuka, terutama di tengah tantangan modernisasi yang kerap mengikis budaya tradisional (Safitri & Jaeni, 2024). Melalui pendekatan *stewardship*, penerapan kearifan lokal diyakini mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan temuan Safitri & Jaeni (2024) serta Ega et al (2020) yang membuktikan bahwa kearifan lokal memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, diajukan hipotesis:

H5: Kearifan Lokal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Komitmen dalam organisasi memegang peran krusial dalam memastikan akuntabilitas di mana aparatur yang berdedikasi tinggi cenderung meningkatkan mutu pelayanan (Amaliya & Maryono, 2022). Berdasarkan teori *stewardship* kesetiaan terhadap institusi mendorong pengelolaan dana desa yang transparan dan bertanggung jawab (Rada et al., 2022). Penelitian dari Amaliya & Maryono (2022), Sari dkk. (2022), Situngkir & Simarmata (2022), dan Pratiwi & Handayani (2022) menguatkan bahwa komitmen organisasi memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H6: Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan populasinya pada seluruh perangkat desa di 15 desa yang berada di wilayah Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh atau sensus, yaitu metode yang melibatkan seluruh anggota populasi sebagai responden penelitian (Amaliya & Maryono, 2022). Sampel terdiri dari aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, anggota BPD dengan masa jabatan minimal satu tahun, serta masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat pemerintahan desa. Berdasarkan rumus slovin, jumlah responden ditetapkan sebanyak 63 orang, yang

mencakup Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara (Kaur Keuangan), anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan teknik *non probability* sampling. Analisis data dilakukan menggunakan software SPSS, dengan tahapan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

UJI VALIDITAS

Pengujian validitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan dalam instrumen benar-benar mencerminkan variabel yang dimaksud. Teknik yang digunakan adalah korelasi *Pearson Product Moment*, yaitu menghubungkan skor tiap item dengan total skor variabel terkait. Suatu pernyataan dianggap valid apabila nilai *r* hitung melebihi *r* tabel sebesar 0,2480 pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini secara rinci menyatakan bahwa hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada masing-masing variabel memiliki nilai koefisien korelasi yang melebihi *r* tabel sebesar 0,2480 pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Artinya, setiap pernyataan dalam variabel Aplikasi Siskeudes (X1), Kompetensi (X2), Transparansi (X3), Sistem Pengendalian Internal (X4), Kearifan Lokal (X5), Komitmen Organisasi (X6), serta Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) terbukti valid. Dengan hasil tersebut, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinilai mampu mengukur masing-masing variabel secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

UJI RELIABILITAS

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* untuk menilai konsistensi internal antar item dalam satu variabel. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* melebihi batas minimum 0,6. Berdasarkan tabel uji reliabilitas, seluruh variabel dalam penelitian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* di atas ambang batas 0,6, yang menandakan bahwa instrumen yang digunakan memiliki tingkat konsistensi internal yang memadai. Nilai untuk masing-masing variabel adalah: Aplikasi Siskeudes (X1) sebesar 0,750, Kompetensi (X2) sebesar 0,617, Transparansi (X3) sebesar 0,732, Sistem Pengendalian Internal (X4) sebesar 0,817, Kearifan Lokal (X5) sebesar 0,651, Komitmen Organisasi (X6) sebesar 0,707, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar 0,844. Dengan nilai-nilai tersebut seluruh instrumen dinyatakan reliabel karena mampu memberikan hasil pengukuran yang stabil dan dapat dipercaya.

UJI NORMALITAS

**Tabel 1 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.33345262
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.069
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		.629
Asymp. Sig. (2-tailed)		.823

Uji normalitas yang dilakukan dengan pendekatan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,823. Karena angka tersebut melebihi ambang batas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual regresi tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap distribusi normal.

UJI MULTIKOLINEARITAS

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.480	3.152		1.739	.088		
Aplikasi SISKEUDES	-.032	.157	-.020	-.203	.840	.849	1.177
Kompetensi	.306	.237	.175	1.287	.203	.446	2.242
Transparansi	.950	.228	.586	4.170	.000	.418	2.391
Sistem Pengendalian Internal	.125	.144	.110	.865	.391	.512	1.954
Kearifan Lokal	-.081	.231	-.040	-.352	.726	.645	1.550
Komitmen Organisasi	-.108	.227	-.066	-.475	.636	.433	2.308

Berdasarkan data pada Tabel 2, seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan. Dengan kata lain, antar variabel independen tidak ditemukan hubungan korelasi yang tinggi, sehingga masing-masing variabel dapat dianggap berdiri secara independen.

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Dalam penelitian ini, metode *Glejser* digunakan untuk menguji apakah terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi. Model dinyatakan bebas dari uji heteroskedastisitas apabila varians residual bersifat konstan dan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independen yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi di atas 0,05. Rincian hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.309	1.991		.658	.514
Aplikasi SISKEUDES	-.026	.099	-.036	-.259	.796
Kompetensi	.086	.150	.110	.576	.567
Transparansi	-.072	.144	-.100	-.503	.617
Sistem Pengendalian Internal	-.111	.091	-.219	-1.223	.226
Kearifan Lokal	-.181	.146	-.198	-1.241	.220
Komitmen Organisasi	.287	.143	.390	2.005	.050

Berdasarkan hasil pengujian yang tercantum dalam Tabel 3 mayoritas variabel independen menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap nilai *absolut residual*. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari indikasi heteroskedastisitas pada tingkat signifikansi 5%.

UJI ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara bersama-sama maupun secara individu. Berdasarkan output regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5.480 - 0.032X_1 + 0.306X_2 + 0.950X_3 + 0.125X_4 - 0.081X_5 - 0.108X_6 + e$$

Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa dari enam variabel bebas yang diuji hanya variabel transparansi yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 dan koefisien regresi positif. Sementara itu, variabel aplikasi siskeudes, kompetensi, sistem pengendalian internal, kearifan lokal, dan komitmen organisasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan karena memiliki nilai signifikansi di atas ambang batas. Meskipun demikian, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal cenderung memiliki pengaruh positif meski tidak signifikan, sedangkan tiga variabel lainnya menunjukkan arah negatif. Dengan demikian,

Transparansi menjadi satu-satunya faktor yang secara signifikan dan positif memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam penelitian ini. Berikut hasil uji analisis regresi linier berganda pada tabel 4.

Tabel 4 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.480	3.152		1.739	.088
Aplikasi SISKEUDES	-.032	.157	-.020	-.203	.840
Kompetensi	.306	.237	.175	1.287	.203
Transparansi	.950	.228	.586	4.170	.000
Sistem Pengendalian Internal	.125	.144	.110	.865	.391
Kearifan Lokal	-.081	.231	-.040	-.352	.726
Komitmen Organisasi	-.108	.227	-.066	-.475	.636

UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Untuk menilai sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen dilakukan pengujian koefisien determinasi (R²). Pengujian ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana model regresi yang dibangun dapat menggambarkan variabilitas variabel yang diteliti. Hasil dari pengujian tersebut disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.733 ^a	.537	.488	1.40307

Berdasarkan Tabel 5, nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,537 mengindikasikan bahwa 53,7% variabilitas akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh enam variabel independen dalam penelitian ini, yaitu aplikasi siskeudes (X1), kompetensi (X2), transparansi (X3), sistem pengendalian internal (X4), kearifan lokal (X5), dan komitmen organisasi (X6). Sementara itu, sisanya sebesar 46,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

UJI F

Uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah seluruh variabel independen secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam studi ini, variabel independen yang diteliti mencakup aplikasi siskeudes, kompetensi, transparansi, sistem pengendalian internal, kearifan lokal, dan komitmen organisasi. Sementara itu, fokus variabel dependen adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari pengujian F secara rinci disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Hasil Uji F ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	128.076	6	21.346	10.843	.000 ^a
Residual	110.242	56	1.969		
Total	238.317	62			

Berdasarkan hasil pada tabel 6, diperoleh nilai F sebesar 10,843 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 menunjukkan bahwa seluruh variabel independent yakni aplikasi siskeudes, kompetensi, transparansi, sistem pengendalian internal, kearifan lokal, dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menegaskan bahwa model regresi yang digunakan layak dan dapat diandalkan untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel dalam penelitian ini.

UJI T

Pengujian t dimaksudkan untuk menilai sejauh mana masing-masing variabel independen memberikan pengaruh secara individual terhadap variabel dependen dalam model regresi yang digunakan. Evaluasi dilakukan pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05). Keputusan ditentukan berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) di mana apabila Sig. < 0,05 maka hipotesis nol (H₀) ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara signifikan.

Sebaliknya, jika nilai Sig. > 0,05 maka H_0 diterima, yang mengindikasikan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variabel tersebut terhadap variabel dependen.

**Tabel 7 Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.480	3.152		1.739	.088
Aplikasi SISKEUDES	-.032	.157	-.020	-.203	.840
Kompetensi	.306	.237	.175	1.287	.203
Transparansi	.950	.228	.586	4.170	.000
Sistem Pengendalian Internal	.125	.144	.110	.865	.391
Kearifan Lokal	-.081	.231	-.040	-.352	.726
Komitmen Organisasi	-.108	.227	-.066	-.475	.636

Berdasarkan hasil uji t, dari enam variabel independen yang dianalisis hanya transparansi (X3) yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan t hitung $4,170 > 2,0034$. Sementara itu, lima variabel lainnya aplikasi siskeudes (X1), kompetensi (X2), sistem pengendalian internal (X4), kearifan lokal (X5), dan komitmen organisasi (X6) memiliki nilai signifikansi masing-masing di atas 0,05 dan t hitung di bawah t tabel, sehingga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Artinya, hanya transparansi yang secara statistik dapat menjelaskan variasi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel lainnya tidak memberikan pengaruh berarti dalam model regresi ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Aplikasi SISKEUDES Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan analisis, aplikasi siskeudes (X1) memperoleh nilai signifikansi $0,840 > 0,05$ dan t hitung $-0,203 < 2,0034$ yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pemanfaatan aplikasi yang belum optimal, di mana sebagian besar perangkat desa hanya menggunakan sebatas pelaporan administratif tanpa memahami fungsinya secara menyeluruh. Minimnya pelatihan serta kebiasaan mencatat secara manual juga turut memengaruhi efektivitas aplikasi ini. Safitri & Jaeni (2024) menyatakan bahwa pemanfaatan aplikasi siskeudes belum mampu meningkatkan akuntabilitas secara signifikan karena akuntabilitas lebih ditentukan oleh kesadaran moral aparatur, bukan sekadar alat digital. Temuan ini juga diperkuat oleh Widiawati et al (2022) yang menyoroti potensi kesalahan input data sebagai penyebab rendahnya akuntabilitas, meskipun sistem ini dirancang untuk mencegah penyimpangan.

Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis, variabel kompetensi (X2) memiliki nilai signifikansi $0,203 (> 0,05)$ dan t hitung $1,284 (< 2,0034)$ sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Hal ini menunjukkan bahwa keahlian atau pengetahuan formal aparat desa di kecamatan kangkung belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap praktik pertanggungjawaban dana desa. Kemungkinan besar kompetensi tersebut belum diterapkan secara maksimal dalam kegiatan pengelolaan. Sebaliknya, faktor seperti nilai integritas, budaya kerja, dan peran pengawasan sosial masyarakat justru lebih menentukan dalam membentuk perilaku yang akuntabel. Temuan ini selaras dengan penelitian Tristiawan et al (2023) serta didukung oleh studi Indraswari & Rahayu (2021), Tiarno & Budiwitjaksono (2023) yang menegaskan bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup tanpa pemahaman regulasi dan penerapan etika kerja yang kuat.

Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), dengan nilai signifikansi $0,000 (< 0,05)$ dan t hitung $4,170 (> 2,0034)$. Artinya, semakin terbuka informasi terkait keuangan desa, maka semakin tinggi pula akuntabilitas yang tercipta. Transparansi mendorong kepercayaan publik dan meningkatkan kesadaran aparat desa akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dana desa. Temuan ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menekankan pentingnya moralitas dan kepentingan publik dalam pengelolaan keuangan, serta sejalan dengan hasil penelitian Nislandi & Munari (2023), Ramadhani & Yuliaty (2021), Raharjo et al (2023), dan Usman et al (2022) yang menunjukkan bahwa transparansi merupakan faktor kunci dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis variabel sistem pengendalian internal (X4) memiliki nilai signifikansi 0,391 ($> 0,05$) dan t hitung 0,865 ($< 2,0034$) yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan internal yang bersifat administratif belum mampu meningkatkan pertanggungjawaban aparatur desa. Secara teoritis, hal ini tidak sejalan dengan teori *stewardship* yang menekankan tanggung jawab moral dan etika dalam mengelola dana desa. Artinya, sistem pengendalian yang bersifat struktural perlu dibarengi dengan kesadaran dan integritas individu untuk menghasilkan akuntabilitas yang efektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Pahlawan et al (2020), Pebriyanto & Sumadi (2021), dan Ridwan et al (2023).

Pengaruh Kearifan Lokal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kearifan lokal (X5) memiliki nilai signifikansi 0,726 $> 0,05$ dan t hitung $-0,352 < 2,0034$ artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai budaya seperti gotong royong dan musyawarah belum diterapkan secara nyata dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Nilai-nilai tersebut masih bersifat sosial dan belum diintegrasikan dalam prosedur formal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Safitri & Jaeni (2024) yang menyebutkan bahwa meskipun kearifan lokal kuat penerapannya dalam pengelolaan dana desa belum optimal.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi (X6) dengan nilai signifikansi 0,636 $> 0,05$ dan t hitung $-0,475 < 2,0034$ tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Ini menunjukkan bahwa loyalitas aparat desa terhadap institusi belum tercermin dalam praktik akuntabel. Komitmen yang ada cenderung formal tanpa diiringi implementasi nyata dalam pengelolaan dana desa secara transparan. Faktor lain seperti pengawasan atau partisipasi publik kemungkinan lebih dominan. Hasil ini bertolak belakang dengan teori *stewardship* dan diperkuat oleh temuan Raharjo et al (2023) dan Budiarto et al (2020) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data menunjukkan bahwa penelitian ini menguraikan dampak dari aplikasi siskeudes, kompetensi, transparansi, sistem pengendalian internal, kearifan lokal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa diuraikan bahwa:

- A. Aplikasi siskeudes tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal
- B. Kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.
- C. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.
- D. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.
- E. Kearifan lokal tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.
- F. Komitmen Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.

Saran

Disarankan untuk penelitian berikutnya memperluas wilayah penelitian ke desa-desa lain di Kabupaten Kendal agar hasilnya lebih representatif. Variabel penelitian juga perlu diperluas dengan memasukkan aspek seperti partisipasi masyarakat dan penggunaan teknologi informasi. Alat ukur penelitian harus dirancang lebih detail untuk mendapatkan data yang valid. Dalam pengelolaan dana desa, penting memperkuat pengawasan serta memaksimalkan teknologi demi transparansi dan efisiensi. Selain itu, keterbukaan informasi dan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan serta pengintegrasian nilai lokal perlu diperkuat untuk mendukung pengelolaan dana desa yang akuntabel dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amaliya, R. A., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 122–133. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.624>
- [2] Aprilia, K. R. A., & Fitria, A. F. (2023). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. In *Media Ilmiah Akuntansi* (Vol. 11, Issue 2). <https://doi.org/10.34208/mia.v11i2.34>
- [3] Arfiansyah, A., Tinggi, S., Islam, A., Astuti, M., & Pendahuluan, W. (2020). *Journal of Islamic Finance and Accounting Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap*

- Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- [4] Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya Pendahuluan. 23(2).
- [5] Ega, R., Dan, P., Nugrahesthy, A., & Hapsari, S. (2020). Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Dana Desa. *AFRE Accounting and Financial Review*, 3(1), 43–58. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.4294>
- [6] Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- [7] Hestiani, N. H. (2023). PENERAPAN KODE ETIK AKUNTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL MACCA'NA MALEMPU' DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LOTANG SALO KABUPATEN PINRANG.
- [8] Indraswari, N. E. I., & Rahayu, Y. R. (2021). PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI. 6.
- [9] Natania Mega, K., Kalangi, L., Kapojos, P. M., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. In *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 17, Issue 3).
- [10] Nislandi, N. A., & Munari, M. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo. In *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 12, Issue 2). <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1518>
- [11] Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 162–172.
- [12] Pebriyanto, I. W. P., & Sumadi, N. K. S. (2021). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, KOMPETENSI APARATUR DESA, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI EMPIRIS DI SE-KECAMATAN SUKAWATI). 372–381.
- [13] Rada, O. :, Sari, R., Putri, A. M., Azmi, Z., & Author, C. (2022). FAKTOR-AKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 7(1), 66–79. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- [14] Raharjo, T. B. R., Novandalina, A. N., & Khasanah, R. N. K. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA. Edisi Februari, 1. <https://doi.org/10.33747>
- [15] Ramadhani, N. S. R., & Yuliati, A. Y. (2021). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 561–571.
- [16] Ridwan, M. R., Santosa, R. E. W. A. S., Suharto, S. S., & Putri, A. P. R. Z. P. (2023). PERAN MODERASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA HUBUNGAN KOMPETENSI PENGELOLA , SISTEM DESA Program Studi Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Muhammadiyah Semarang Departemen of Finance , National Yunlin University of Science and Technology , Taiwan. 12(1), 92–101.
- [17] Safitri, N. S., & Jaeni, J. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 16–24. <https://doi.org/10.33366/ref.v11i2.5002>
- [18] Saputra, Y., Sekar Sari, M., & Warisi, D. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). In *Gedong Meneng* (Issue 7). <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- [19] Situngkir, A., & Simarmata, B. I. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Samosir). In *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan* (Vol. 5, Issue 2).
- [20] Tiarno, S. M., & Budiwitjacksono, G. S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip), Dan Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1596–1608. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3015>
- [21] Tristiawan, F., Mila, S., & Dewi, D. O. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pemerintah

- Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8137522>
- [22] Usman, Mahfiza, & Lamusi, M. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. *Al-Buhuts e- Journal*, Volume 18(Nomor 2), 517-528.
- [23] Widiawati, D., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. (2022). Analysis of Determinants on Village Fund Management Accountability. *Urecol Journal. Part B: Economics and Business*, 2(1), 9-19. <https://doi.org/10.53017/ujeb.128>.